

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kembali berkuasanya pemerintahan Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021 telah menciptakan dinamika baru dalam tatanan geopolitik di Asia Selatan serta dalam hubungan luar negeri dengan Indonesia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, menghadapi dilema dalam mengelola hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Indonesia ingin melanjutkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan Afghanistan, namun pada saat yang sama belum siap memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan.

Setelah menguasai kembali pemerintahan di Afghanistan, Taliban tetap menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari komunitas internasional yang masih enggan memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Meskipun sampai dengan bulan Maret 2023, 14 negara telah mengizinkan Taliban mengelola misi diplomatik Afghanistan di wilayah mereka, pengakuan resmi tetap sulit dicapai (Associated Press, 2023).

China menjadi negara pertama yang mengirimkan Duta Besar ke Kabul pada September 2023 dan menerima Surat Kepercayaan Duta Besar Afghanistan di Beijing pada Desember 2023 (Gul, 2023). Namun demikian China tetap belum memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai penguasa yang sah dari Afghanistan.

Selain itu, isu terkait perwakilan Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sampai dengan Agustus 2023 masih belum terselesaikan (United Nations, 2023). Pejabat Perwakilan yang ditugaskan oleh Taliban tidak berhasil meyakinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui calon yang mereka tunjuk sebagai wakil negara Afghanistan di PBB. Situasi ini mencerminkan kesulitan Taliban dalam membangun otoritas global dan memastikan legitimasinya di mata masyarakat internasional.

Penolakan sebagian besar negara untuk mengakui pemerintahan Taliban dapat dijelaskan oleh berbagai kekhawatiran. Pertama, cara Taliban merebut kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya, telah menimbulkan keraguan tentang keabsahan kekuasaan mereka. Kurangnya penyelesaian melalui perundingan dan kurang inklusifnya proses pembentukan pemerintahan semakin memperburuk ketidakpastian ini.

Kedua, tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas, beserta keterlibatan mereka dengan organisasi teroris internasional, menyebabkan negara-negara berhati-hati dalam

memberikan pengakuan tanpa ada bukti nyata perubahan yang sungguh-sungguh dalam perilaku dan pendekatan pemerintahan Taliban.

Meskipun Taliban sulit mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional, namun fakta menunjukkan bahwa kemampuan Taliban untuk kembali menguasai Afghanistan dalam waktu yang singkat pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat dan NATO, menunjukkan adanya dukungan publik Afghanistan yang cukup kuat terhadap Taliban. Penguasaan Taliban secara de facto di Afghanistan bagaimanapun juga merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh dunia internasional.

Kondisi politik dalam negeri Afghanistan saat ini cukup mengkhawatirkan dengan diterapkannya kebijakan yang represif dan tidak demokratis atas dasar agama. Taliban dalam hal ini menggunakan agama sebagai dasar legitimasi kebijakan politik yang sangat tersentralisasi dengan control yang sangat kuat. Sistem pemerintahan Islam Emirat yang dipilih Taliban menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang emir dari kelompok elit Taliban, sebagai merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini berpotensi memperkuat cengkeraman kekuasaan Taliban untuk waktu yang lama di Afghanistan.

Kondisi ekonomi dalam negeri Afghanistan serta bagaimana cara Taliban memerintah akan sangat mempengaruhi prospek kelangsungan kekuasaan Taliban di Afghanistan. Keberhasilan pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan Taliban, misalnya, akan sangat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat. Jika Taliban dapat mengatasi tantangan-tantangan ekonomi dan mendapatkan dukungan dari

masyarakat Afghanistan, maka prospek pemerintahannya akan lebih baik. Namun, jika Taliban tidak bisa mengatasi tantangan tersebut, maka pemerintahannya tidak akan bertahan lama.

Selain itu kebijakan Taliban yang membatasi HAM, terutama hak-hak perempuan telah menimbulkan kecaman dunia internasional terhadap Taliban. Namun demikian, Taliban telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan hukum Islam yang ketat di Afghanistan. Hal ini membuat pembatasan hak asasi manusia dikhawatirkan juga akan bertahan lama dan dunia internasional akan terus dihadapkan pada dilema dalam menjalankan hubungan dengan Afghanistan.

Dari perspektif Indonesia, selain tindakan yang dilakukan Taliban, pandangan negatif terhadap Taliban juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh Indonesia, khususnya nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak wanita dan kelompok minoritas. Namun demikian, meskipun masih banyak pandangan negatif dan Indonesia sampai saat ini belum memberikan pengakuan resmi kepada Taliban, namun Indonesia tetap menjalankan hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Hal ini antara lain dengan tetap beroperasinya Kedutaan Besar Indonesia di Kabul serta dengan dilaksanakannya berbagai program bantuan kemanusiaan yang diberikan langsung kepada rakyat Taliban.

Peran Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dan pembangunan Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di komunitas internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia

yang berhasil menjalankan demokrasi dengan baik, Indonesia memiliki kredibilitas dan legitimasi yang kuat untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Afghanistan. Indonesia sering kali dijadikan model bagi negara-negara Muslim lainnya karena keberhasilannya dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sikap Indonesia ini juga tidak terlepas dari nilai solidaritas Islam, dimana Indonesia dianggap memiliki tanggungjawab moral untuk membantu Afghanistan.

Sejak lama, Indonesia telah menerapkan kebijakan luar negeri yang mengutamakan prinsip non-intervensi dan diplomasi yang damai. Namun, prospek pemerintahan Taliban yang berlangsung dalam jangka panjang di Afghanistan menghadirkan rangkaian tantangan dan peluang yang kompleks bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki tujuan melindungi kepentingan nasional, mempromosikan stabilitas regional, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan, Indonesia juga menghadapi dilema saat menjalankan interaksi dengan rezim Taliban yang dikenal dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia dan keterlibatannya dalam tindakan terorisme. Ini menciptakan situasi yang rumit yang harus dihadapi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan pemerintahan Taliban. Hal ini antara lain ditunjukkan saat kunjungan delegasi Taliban ke Jakarta pada Juli 2023 dimana dilakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik

namun tidak ada pertemuan resmi dengan pemerintah Indonesia (CNBC Indonesia, 2023).

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dan kajian analisis kebijakan luar negeri Indonesia dengan menggunakan kerangka teoritis dan analitis konstruktivisme untuk menjawab dua pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Apa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan Afghanistan di bawah Taliban?
- 2) Bagaimana menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia pasca kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan pada tahun 2021 dengan menggunakan teori konstruktivisme?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan Afganistan di bawah Taliban

- 2) Memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afganistan setelah Taliban berkuasa kembali di Afganistan sejak tahun 2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Magister Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini diharapkan akan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hubungan internasional, khususnya terkait dengan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afganistan di bawah pemerintahan Taliban. Studi ini juga akan memberikan kontribusi dalam literatur tentang pengaruh nilai, norma, dan identitas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, yang pada gilirannya akan memperkaya diskursus akademis terkait teori konstruktivisme dalam studi hubungan internasional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisa untuk pembuatan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hubungan bilateral dengan Afganistan di bawah pemerintahan Taliban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada bidang akademis tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak praktis yang nyata bagi pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia.

## **1.5. Kerangka Penulisan**

Bab I, Pendahuluan, menguraikan konteks penelitian terkait kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021 dan dampaknya terhadap hubungan luar negeri Indonesia. Bab ini membahas dilema Indonesia dalam mengelola hubungan dengan Taliban, yang tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional karena kekhawatiran terkait cara mereka merebut kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan keterlibatan dengan organisasi teroris. Bab ini juga menjabarkan pertanyaan penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan luar negeri Indonesia pasca-kembalinya Taliban menggunakan teori konstruktivisme. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia, memberikan kontribusi akademis, dan menawarkan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah Indonesia.

Bab II, Kerangka Berpikir, menguraikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi tiga klasifikasi utama: Prospek Keberlanjutan Pemerintah Taliban di Afghanistan, Tantangan Pelaksanaan Diplomasi dengan Taliban, dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Klasifikasi pertama membahas dukungan publik terhadap Taliban di Afghanistan meskipun dengan catatan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma internasional. Klasifikasi kedua menyoroti kekhawatiran global terkait hak asasi manusia dan stabilitas di Afghanistan serta pentingnya memahami ideologi dan asal usul Taliban. Klasifikasi ketiga membahas prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung pragmatis



dan realistis, serta peran penting Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengelola hubungan dengan Taliban. Selanjutnya, bab ini menjabarkan kerangka teoritis konstruktivisme yang menjadi landasan analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taliban, dengan menekankan peran norma, nilai, identitas, dan inter-subyektifitas dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara.

Bab 3 Metodologi, menguraikan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk menganalisis konstruktivisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan periode Agustus 2021 - Mei 2024. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi, sementara teknik analisis data mengikuti empat langkah yaitu pembuatan pola, pembuatan eksplanasi, analisis deret waktu, dan teknik model logika. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh konstruktivisme terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggapi situasi pasca kembalinya pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan analisa kebijakan luar negeri Indonesia dengan pendekatan konstruktivisme dalam menganalisis dinamika hubungan internasional. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas politik terbentuk melalui interaksi sosial dan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat internasional. Bab IV ini diawali dengan penjelasan terkait sejarah dinamika hubungan Indonesia – Afghanistan, dan

selanjutnya menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam berhubungan dengan Taliban serta bagaimana nilai, norma dan identitas nasional Indonesia mempengaruhi kebijakan luar negeri terhadap Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban.

Bab V Penutup, berisi uraian tetang kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan Indonesia dengan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Selain itu juga diajukan sejumlah rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia yang perlu dipertahankan dan diperkuat dalam rangka memajukan hubungan bilateral Indonesia – Afghanistan.

